



Urgensi Pengutamaan PAUD dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Nurkolis Nurkolis^{1✉}, Muhdi Muhdi², Yovitha Yuliejantiningih³

Manajemen Pendidikan, Universitas PGRI Semarang, Indonesia ^(1,2,3)

DOI: [10.31004/obsesi.v7i5.4187](https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.4187)

Abstrak

Berbagai kebijakan PAUD telah dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun implementasinya belum memadai. Tujuan artikel ini untuk mengetahui partisipasi peserta didik PAUD, kualitas layanan PAUD, dan kebijakan dalam pengutamaan atau pengarusutamaan PAUD. Artikel ini berdasarkan penelitian kebijakan dengan metode campuran kuantitatif-kualitatif berdesain *concurrent embedded*. Jumlah permasalahan ada tiga, dua masalah dianalisis secara kuantitatif, satu masalah dianalisis secara kualitatif. Penelitian dilakukan di lima daerah pada Juli-Desember 2022. Data kuantitatif terdiri dari data primer sekunder, data kualitatif berasal dari dokumen kebijakan. Data kuantitatif diolah dengan Excel, data kualitatif diolah dengan Nvivo 12 Plus. Novelty artikel ini adalah ditemukannya pengarusutamaan PAUD dalam kebijakan pendidikan yang belum pernah diteliti sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi peserta didik dan kualitas layanan PAUD termasuk kategori menengah. PAUD diarusutamakan di 18 dokumen kebijakan. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi berharga akan pentingnya pengarusutamaan PAUD dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: *kualitas layanan paud; millennium development goals; sustainable development goals; partisipasi paud.*

Abstract

Various PAUD policies have been made by the Government and Regional Governments, but their implementation has not met expectations. The purpose of this article is to find out the participation of PAUD students, the quality of PAUD services, and policies in PAUD mainstreaming. This article is based on policy research using a mixed quantitative-qualitative method with a concurrent embedded design. There are three problems, the two problems are analyzed quantitatively and one qualitatively. The research was conducted in five regions in July-December 2022. The quantitative data consist of primary and secondary, while qualitative data come from policy documents. Quantitative data is processed with Excel, while qualitative data with Nvivo 12 Plus. The novelty of this article is the discovery of early childhood mainstreaming in education policy which has never been researched before. The results showed that the participation of PAUD students and the quality of PAUD services were in the middle category. The PAUD mainstreaming was found in 18 policy documents. The results of this study provide a valuable contribution to the importance of mainstreaming PAUD in education policy in Indonesia.

Keywords: *quality of ecd services; millennium development goals; sustainable development goals; ecd participation*

Copyright (c) 2023 Nurkolis Nurkolis, et al.

✉ Corresponding author : Nurkolis Nurkolis

Email Address : nurkolis@upgris.ac.id (Semarang, Indonesia)

Received 26 February 2023, Accepted 16 April 2023, Published 8 November 2023

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “pengutamaan” adalah proses mengutamakan. Mengutamakan adalah menjadikan utama atau menjadikan lebih penting. Kata “pengutamaan” dalam artikel ini ingin menggambarkan “pengarusutamaan” yang dalam bahasa Inggris disebut “*mainstreaming*”. Pengarusutamaan berasal dari kata “arus utama”. Wikipedia memaknainya sebagai pemikiran umum saat ini yang berlaku secara luas di masyarakat.

Kementerian Lingkungan Hidup mamaknai “pengarusutamaan” sebagai proses untuk menjadikan isu atau fenomena yang sebelumnya dianggap tidak penting menjadi penting melalui proses pengambilan keputusan (<https://elearning.menlhk.go.id>). Sementara itu Kementerian Pendidikan memaknai pengarusutamaan sebagai proses membentuk ide yang diterima oleh masyarakat (<https://kbbi.kemdikbud.go.id>). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah pembinaan anak sejak lahir hingga usia 6 tahun (Indonesia, 2003). Dengan demikian dapat dimaknai bahwa pengutamaan atau pengarusutamaan PAUD adalah menjadikan isu dan permasalahan PAUD menjadi penting untuk dibahas melalui kebijakan pendidikan.

Pencarian frasa “pengutamaan PAUD” atau “pengarusutamaan PAUD” di mesin pencarian *google scholar* tidak ditemukan, mayoritas yang muncul adalah “pengarusutamaan gender”. Di sisi lain pencarian menggunakan frasa “*mainstreaming early childhood education*” sangat banyak bahkan di luar negeri isu PAUD sudah ramai dibicarakan para ahli dan pemerhati pendidikan sejak tahun 1980-an. Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang pengarusutamaan PAUD di Indonesia belum banyak dibahas dan diteliti oleh para pakar terkait.

Berbagai survey menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua di Indonesia menghabiskan waktunya untuk bekerja dibandingkan dengan berinteraksi dengan anak-anaknya. Padahal keterlibatan orang tua sangat penting dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Holiza & Yaswinda, 2022). Salah satu masalah di PAUD adalah masih kurang pemahaman masyarakat tentang PAUD. Orang tua belum menyadari bahwa tanggung jawab terbesar mendidik ada pada orang tua. PAUD juga mengalami kendala pada pendidik yaitu masih banyak yang belum kreatif, inovatif, dan belum menguasai tentang konsep PAUD (Cholimah, 2013).

Para analisis ekonomi menunjukkan bukti bahwa pendidikan anak usia dini tidak hanya penting tetapi juga hemat biaya. PAUD memberi manfaat bagi yang termiskin dan paling terpinggirkan serta membawa manfaat ekonomi dan sosial yang lebih luas (Woodhead, 2016). Di Thailand berdasarkan penelitian tahun 2019, ada bukti hubungan antara perkembangan anak usia dini dan faktor sosiodemografi. Sebanyak 5.787 anak berusia 3-4 tahun sebagai responden penelitian menunjukkan 92,3%, telah mencapai tingkat indeks perkembangan anak usia dini yang sesuai. Setidaknya dalam tiga dari empat domain kognitif, fisik, sosial, dan pembelajaran. Masih diperlukan kebijakan multi-sektor untuk mendukung perkembangan anak dari rumah tangga sosial ekonomi rendah harus diperkuat (Topothai *et al.*, 2022). Di Indonesia juga menunjukkan terdapat perbedaan tingkat perkembangan anak yang telah mengikuti PAUD dibandingkan dengan yang tidak mengikutinya. Anak yang telah mengikuti PAUD minimal 3 bulan mampu mencapai tugas-tugas perkembangan anak sepenuhnya yaitu perkembangan motorik, perkembangan sosial, dan perkembangan bahasa (Septiani, Widyaningsih, & Iqomh, 2019).

Di beberapa negara, terutama negara miskin pencapaian kapasitas pendidikan untuk mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) belum tercapai dan merupakan agenda utama dalam *Sustainable Development Goals*, SDGs (Zulyanto, 2022). Kondisi pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya merata antar daerah. Strategi pencapaian SDGs sebagai upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia baru diterapkan di beberapa provinsi. Penerapannya pun masih mengalami berbagai hambatan seperti sulitnya akses ke sekolah, perbedaan adat istiadat, kualitas kompetensi guru (Safitri, Yunianti, & Rostika, 2022). Dari segi

proses, pelaksanaan SDGs pendidikan bermutu di tingkat nasional masih perlu dibenahi pada mekanisme akuntabilitas dan partisipasi pihak non pemerintah (Rulandari, 2021). Secara keseluruhan kinerja pencapaian SDG di Indonesia berdasarkan laporan tahun 2022 ini mencapai 69,2% atau berada pada peringkat 83 dari 163 negara (Sachs *et al.*, 2022). Sistem persekolahan menghadapi beberapa keterbatasan dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas untuk semua. Terjadi kesenjangan antara negara maju dan negara terpinggirkan dalam akses pendidikan. Sementara itu mengakses pendidikan tidak menjamin pembelajaran yang sebenarnya (Tanaka *et al.*, 2019).

Mutu pelayanan dasar pendidikan di Indonesia diatur oleh Kemendikbudristek antara lain mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa PAUD antara lain meliputi partisipasi dan pemerataan peserta didik serta kualitas dan pemerataan layanan. Partisipasi dan pemerataan peserta didik PAUD antara lain mencakup angka partisipasi murni dan angka partisipasi sekolah. Di jenjang PAUD, kualitas dan pemerataan layanan menggunakan indikator proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B. Kualitas guru PAUD harus memenuhi persyaratan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang PAUD, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat pendidik untuk PAUD (Mendikbudristek, 2022).

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal yaitu partisipasi peserta didik PAUD, kualitas layanan PAUD, dan menemukan bukti-bukti pengarusutamaan PAUD dalam Kebijakan Pendidikan di Indonesia. Bukti-bukti kebijakan pengutamaan atau pengarusutamaan PAUD dalam kebijakan pendidikan inilah yang menjadi novelty penelitian ini. Kebijakan pendidikan adalah area keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok terkait dengan pendidikan sebagai panduan untuk bertindak dalam menyelesaikan permasalahan pendidikan (Mushlih *et al.*, 2018).

Metodologi

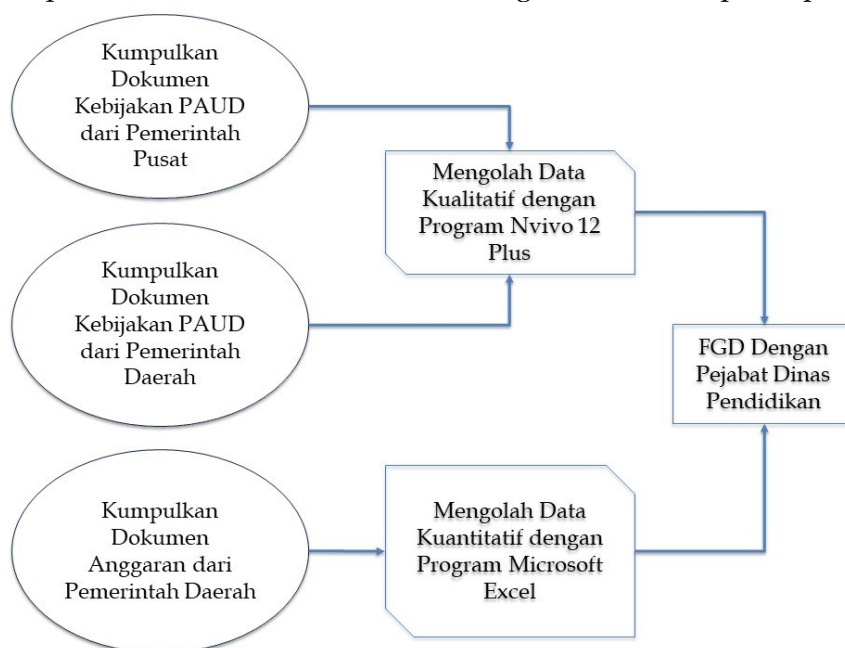
Penelitian ini adalah penelitian kebijakan dengan model campuran kuantitatif kualitatif dengan desain *concurrent embedded* (Sugiyono, 2017). Pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dilakukan secara bersamaan sementara itu jumlah permasalahan yang diteliti ada tiga. Permasalahan pertama dan kedua lebih diolah secara kuantitatif, sedangkan permasalahan ketiga diolah secara kualitatif. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Tengah pada empat kabupaten/kota yaitu Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan tingkat provinsi kurun waktu Juli-Desember 2022. Sumber data kuantitatif primer berasal dari dokumen anggaran Pemerintah Daerah sebanyak 4 buah Rencana Kerja (Renja) tahunan atau Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) tahun 2022 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Sumber data kuantitatif sekunder berasal dari data hasil rapor pendidikan, laporan APK dan APM PAUD Badan Pusat Statistik (BPS), dan Laporan Angka Partisipasi Kasaar (APK) PAUD Kementerian Pendidikan.

Sumber data kualitatif berasal dari dokumen kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Pusat sebanyak 10 buah dokumen kebijakan pendidikan. Terdiri dari 6 dokumen kebijakan Pemerintah Pusat terkait pendidikan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, RPJMN tahun 2015-2019, RPJMN tahun 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Data kualitatif juga bersumber dari 4 dokumen kebijakan pendidikan Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif adalah program Nvivo 12 Plus yaitu *software* untuk penelitian kualitatif (Bandur, 2019), sementara itu alat bantu untuk mengolah data kuantitatif adalah Microsoft Excel. Untuk meningkatkan validitas data

terutama data kuantitatif yang bersumber dari dokumen kebijakan anggaran, maka dilakukan forum diskusi terpumpun (*focus group discussion-FGD*) dengan menghadirkan para pejabat structural di Dinas Pendidikan Kabuapten/Kota terdiri dari Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Kepala Seksi atau yang sederajat. Tujuan FGD ini adalah untuk mendapatkan konfirmasi apakah alokasi anggaran yang tertuang di dalam dokumen kebijakan anggaran Renja atau RKA sudah sesuai.

Langkah-langkah analisis data adalah mengumpulkan dokumen kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mengumpulkan dokumen anggaran dari pemerintah daerah, menganalisis dokumen kebijakan pemerintah pusat dan daerah menggunakan program Nvivo 12 Plus, menganalisis dokumen anggaran menggunakan program Microsoft Excel, dan akhirnya melakukan konfirmasi kepada pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota melalui FGD. Jika digambarkan tampak seperti gambar 1.



Gambar 1. Proses Analisis Data Kualitatif dan Kuantitatif

Hasil dan Pembahasan

Bagaimanakah partisipasi peserta didik PAUD?

SDGs mengamanatkan negara-negara untuk memperbaiki partisipasi pendidikan berkualitas agar masyarakat memperoleh akses yang sama, adil, dan tanpa diskriminasi terhadap pendidikan, sehingga pendukung pembangunan berkelanjutan (Amedi, 2018). Angka partisipasi PAUD di Jawa Tengah masih tergolong menengah seperti tampak pada **tabel 1**. Angka partisipasi tersebut berdasar tiga indikator yaitu angka kesiapan sekolah (AKS), angka partisipasi kasar (APK), dan angka partisipasi murni (APM) yang bersumber dari rapor pendidikan kabupaten/kota yang diteliti. Data tersebut menunjukkan bahwa AKS PAUD yang masuk kategori rendah ada di Kabupaten Cilacap, Kota Semarang, dan secara umum di Provinsi Jawa Tengah. Daerah yang termasuk kategori tinggi hanya ada di Kabupaten Kendal. Kabupaten Cilacap memiliki APK dan APM PAUD yang rendah. Sementara itu Kota Semarang memiliki APM yang tinggi.

Data mentah tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam kategori dalam setiap indikator. Di Kabupaten Banyumas, ketiga indikatornya termasuk kategori menengah. Kabupaten Cilacap ketiga indikatornya termasuk kategori rendah. Kabupaten Kendal indikator AKS termasuk kategori tinggi, sedangkan indikator APK dan APM termasuk kategori menengah. Kota Semarang indikator AKS termasuk kategori rendah, indikator APK termasuk kategori menengah, dan indikator APM termasuk kategori tinggi. Sedangkan di Provinsi Jawa Tengah indikator AKS termasuk kategori rendah, sementara itu indikator APK

dan APM termasuk kategori menengah. Dari 15 sel (3 indikator x 5 daerah) yang termasuk kategori tinggi ada 2 sel, yang termasuk kategori rendah ada 5 sel, dan yang termasuk kategori menengah ada 8 sel. Dengan demikian berdasarkan modus, maka angka partisipasi PAUD di Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori menengah.

Tabel 1. Angka Partisipasi PAUD di 5 Daerah

Daerah	AKS (%)	APK 3-6 tahun (%)	APM 3-6 tahun (%)
1. Kabupaten Banyumas	68,00	63,13	61,01
2. Kabupaten Cilacap	11,13	34,34	32,82
3. Kabupaten Kendal	80,60	71,98	69,12
4. Kota Semarang	14,62	75,91	72,22
5. Provinsi Jawa Tengah	46,78	55,54	52,51

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Data tersebut sesuai dengan temuan penelitian lain yang menunjukkan sebesar 34% anak usia 3-5 tahun belum mendapatkan atau mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Bukti menunjukkan bahwa APK anak usia dini yang terdaftar sebagai siswa PAUD di Indonesia masih kurang. Tampaknya kesadaran akan pentingnya PAUD terhadap perkembangan anak usia dini belum sepenuhnya tumbuh (Nengsi, 2019).

Sumber resmi BPS tahun 2021 yang diakses tanggal 12 Oktober 2022 menunjukkan bahwa APK PAUD di Provinsi Jawa Tengah sudah menduduki peringkat tinggi jika dibanding dengan 34 Provinsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada **tabel 2**. APK PAUD Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat 4 terbaik dengan prosentase 47,33%. APK PAUD Provinsi Jawa Tengah lebih baik jika dibanding dengan APK PAUD nasional yang hanya mencapai 35,59% (Badan Pusat Statistik, 2023). Walaupun posisinya sudah di peringkat keempat, namun prosentase capaiannya belum baik.

Tabel 2. APK PAUD Menurut Provinsi

Provinsi	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
A. 10 Provinsi dengan APK PAUD Terendah			
1. Papua	11.66	11.47	10.51
2. Kalimantan Barat	20.90	22.69	21.66
3. Sumatera Utara	23.32	24.51	22.53
4. Riau	25.71	25.61	23.64
5. Sumatera Selatan	24.45	26.24	24.24
6. Papua Barat	27.93	26.45	24.65
7. Kalimantan Timur	29.52	28.67	26.03
8. Bengkulu	27.87	28.44	26.53
9. Sumatera Barat	30.39	29.87	27.53
10. Banten	28.45	30.44	27.58
B. 10 Provinsi dengan APK PAUD Tertinggi			
1. DKI Jakarta	43.08	39.44	36.68
2. Sulawesi Tengah	37.62	39.40	37.09
3. Maluku Utara	38.23	37.88	38.76
4. Nusa Tenggara Barat	42.29	42.46	41.01
5. Sulawesi Barat	41.41	42.35	43.38
6. Kalimantan Selatan	42.33	45.71	43.79
7. Jawa Tengah	48.72	50.24	47.33
8. Gorontalo	49.49	48.47	50.18
9. Jawa Timur	55.70	56.24	53.33
10. DI Yogyakarta	67.75	67.46	64.76
Indonesia	36.93	37.52	35.59

Sumber: Disarikan dari BPS yang diakses 12 Oktober 2022

Laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan, APK PAUD di Provinsi Jawa Tengah sudah mencapai 53,79% juga lebih tinggi dari APK PAUD nasional yaitu 39,96. Data ini lebih tinggi dibandingkan yang dilaporkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik, 2023). Perbedaan data BPS dan data Kemendikbudristek ini diperkirakan perbedaan sumber data yaitu BPS memasukkan siswa di bawah binaan Kementerian Agama sementara itu data Kemendikbudristek tidak termasuk.

Lima provinsi dengan APK terendah pada tahun 2021 adalah Papua, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan. Sementara itu lima provinsi dengan APK tertinggi adalah DI Yogyakarta, Jawa Timur, Gorontalo, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan BPS yang menunjukkan APK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 mencapai 47,33% dan laporan Kemendikbudristek tahun 2021 sebesar 53,79% maka angka partisipasi PAUD di Provinsi Jawa Tengah dapat dikategorikan menengah.

Rendah dan tingginya angka partisipasi PAUD karena anak PAUD masih tergantung pada orang tuanya. Partisipasi dan kemudahan orang tua menjangkau sekolah anak-anaknya menentukan angka partisipasi PAUD (Rohmani, 2020). Angka partisipasi PAUD di pedesaan lebih rendah jika dibandingkan di perkotaan karena faktor kurangnya pengetahuan akan pentingnya PAUD. Maka sebaran partisipasi PAUD tidak merata di sebagian besar provinsi di Indonesia. Di dunia pun juga terjadi ketimpangan antara negara berpenghasilan rendah dibanding negeri berpenghasilan tinggi. Hanya 42% anak-anak di negara-negara berpenghasilan rendah yang memiliki akses ke PAUD, sementara di negeri-negara berpenghasilan tinggi mencapai 93% (Tanaka *et al.*, 2019).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi APK PAUD yaitu jumlah lembaga PAUD dan Rasio Jumlah Siswa per lembaga PAUD (Kartakusumah, 2018). Maka penting untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan PAUD seperti POS PAUD Keliling yang terbukti bisa meningkatkan APK (Puspitasari, 2015). Pemberdayaan orang tua siswa sangat penting demi keberhasilan PAUD, namun belum banyak yang berhasil (Suharyat *et al.*, 2023). Peluang mengajak orang tua milenial untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD semakin terbuka, karena 62,6% orang tua milenial telah mengirim anaknya ke PAUD/play group/day care (Darajah & Wijayanti, 2023). Orang tua menjadi andalan keberhasilan PAUD baik di rumah maupun di sekolah (Ulfah, 2019).

1. Bagaimanakah kualitas layanan PAUD?

Kualitas layanan PAUD dalam penelitian ini ditinjau dari dua indikator yaitu kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) dan distribusi guru dan pengawas PAUD. Berdasarkan analisis rapor pendidikan tingkat daerah di 5 daerah yang diteliti, kualitas PTK termasuk kategori menengah seperti terlibat pada **tabel 3**. Proporsi kepala PAUD yang berpendidikan S1/D4 sudah tinggi di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kendal, dan Kota Semarang. Hanya Kabupaten Cilacap yang proporsinya masih masuk kategori menengah. Semua daerah yang diteliti memiliki kategori rendah dalam proporsi PTK yang mengikuti diklat teknis terkait PAUD. Artinya guru PAUD kurang mengikuti diklat teknis pembelajaran PAUD dan Pengelola/Kepala PAUD kurang dalam mengikuti diklat teknis pengelolaan PAUD.

Data tersebut selanjutnya di terjemahkan ke dalam kategori untuk setiap indikator dan setiap daerah. Indikator proporsi pendidik S1/D4 di semua daerah menunjukkan kategori menengah, indikator Kepala Sekolah (KS) S1/D4 di Kabupaten Cilacap termasuk kategori menengah dan di daerah lainnya tinggi, indikator Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) bersertifikat PPG (Program Pendidikan Guru) termasuk kategori menengah di semua daerah, indikator proporsi PTK di Diklat teknis termasuk kategori rendah di semua daerah, dan indikator standar kompetensi pendidik termasuk kategori menengah di semua daerah. Dari 25 sel (5 indikator x 5 daerah) termasuk kategori tinggi ada 4 sel, kategori rendah ada 5 sel, dan kategori menengah ada 16 sel. Berdasarkan modus, maka kualitas PTK di Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori menengah.

Tabel 3. Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD

Daerah	Proporsi Pendidik S1/D4 (%)	Proporsi KS S1/D4 (%)	Proporsi PTK Bersertifikat PPG (%)	Proporsi PTK di Diklat Teknis (%)	Standar Kompetensi Pendidik (%)
1. Kabupaten Banyumas	49.71	70.94	41.36	0.8	51.12
2. Kabupaten Cilacap	42.11	59.66	38.3	0.75	51.05
3. Kabupaten Kendal	66.13	74.48	47.27	0.14	50.72
4. Kota Semarang	64.71	74.85	43.19	0.26	52.85
5. Provinsi Jawa Tengah	57.32	73.69	44.07	0.65	51.07

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Kualitas distribusi guru dan pengawas PAUD di daerah yang diteliti juga termasuk kategori menengah seperti pada **tabel 4**. Indeks distribusi guru PAUD yang tinggi ada di Kota Semarang, sedangkan jumlah pengawas PAUD di Kota Semarang termasuk kategori rendah. Ketersediaan jumlah pengawas yang tinggi ada di Kabupaten Cilacap walaupun indeks distribusi gurunya termasuk kategori sedang.

Tabel 4. Distribusi Guru dan Pengawas PAUD

Daerah	Indeks Distribusi Guru (%)	Ketersediaan Jumlah Pengawas (%)
1. Kabupaten Banyumas	0.91	4.17%
2. Kabupaten Cilacap	0.81	7.76%
3. Kabupaten Kendal	0.62	3.44%
4. Kota Semarang	0.96	2.25%
5. Provinsi Jawa Tengah	0.79	3.04%

Sumber: Rapor Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi

Data tersebut diterjemahkan ke dalam kategori untuk setiap indikator dan daerah. Indikator indeks distribusi guru di Kota Semarang termasuk kategori tinggi sedangkan daerah lainnya termasuk menengah. Indikator ketersediaan jumlah pengawas di Kabupaten Cilacap termasuk kategori tinggi, di Kota Semarang masuk kategori rendah, dan 3 daerah lainnya termasuk kategori menengah. Dari total 10 sel (2 indikator x 5 daerah), yang termasuk kategori rendah ada 1 sel, yang termasuk kategori tinggi ada 2 sel, dan yang termasuk kategori menengah ada 7 sel. Berdasar modus, maka distribusi guru dan pengawas di Provinsi Jawa Tengah termasuk kategori menengah.

Kompetensi guru PAUD di Jawa Tengah belum tinggi atau belum baik. Hal ini terkait dengan diklat teknis yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama juga belum baik atau belum tinggi. Penelitian membuktikan bahwa di Indonesia hanya sedikit orang yang tertarik menjadi tenaga pendidik PAUD dikarenakan masyarakat belum menyadari betapa pentingnya PAUD bagi anak maupun bagi masa depan bangsa (Suryani, 2007). Orang tua, masyarakat, dan pemerintah di Indonesia kurang menyadari pentingnya stimulasi dini yang tepat kepada anak-anak di usia ini. Akibatnya perlakuan kepada anak dalam proses belajar dan tumbuh kembangnya cenderung tidak sesuai perkembangan (Astuti, 2004).

Pada hal secara teoretis PAUD ini sangat penting agar anak mulai melakukan interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial di keluarga, sekolah, dan masyarakat. PAUD akan menentukan perkembangan dan memiliki implikasi jangka panjang untuk kesehatan, kesejahteraan, dan potensi penghasilan saat dewasa. Kegagalan mencapai potensi

perkembangan anak usia dini berkontribusi pada siklus global kemiskinan, ketidaksetaraan, dan pengucilan sosial (Schiariti, Simeonsson, & Hall, 2021).

Rendahnya tingkat pelatihan teknis pendidik dan tenaga kependidikan PAUD berkorelasi dengan kualitas guru PAUD. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari tingkat inisiatif guru, kompetensi guru, dan kemampuan teknologi digital mereka. Apalagi banyak guru PAUD yang latar belakangnya tidak sesuai dengan bidang PAUD, sehingga pelatihan teknis PAUD sangat diperlukan.

Guru PAUD perlu memiliki inisiatif mengembangkan potensi dirinya, misalkan melalui diskusi kelompok dengan sesama guru PAUD. Inisiatif pengembangan potensi diri penting dalam rangka meningkatkan kompetensi mereka (Fakhrudin, 2019). Di era digital ini, guru PAUD tidak cukup hanya memiliki empat kompetensi saja yaitu profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian. Guru PAUD juga dituntut memiliki teknologi digital dalam berbagai bentuk aplikasinya (Nurhamidah & Nurhafizah, 2019).

Kualitas guru PAUD masih menjadi masalah, karena banyak yang tidak sesuai dengan kompetensi guru PAUD. Hal ini ditemukan oleh (Nazidah, 2021), (Yusutria, 2019), dan (Hayon, 2019) bahwa sulit mencari guru berlatar belakang pendidikan PAUD. Padahal temuan penelitian (Ita, 2020) menunjukkan kualitas guru PAUD yang memiliki latar belakang pendidikan PAUD/Psikologi lebih baik dibandingkan dengan guru lain (Nusa & Irawan, 2020). Kesulitan ini saling terkait antara masalah gaji dan kesejahteraan guru, kualifikasi dan sertifikasi guru, serta pengembangan karir dan profesi guru (Choiro & Prasetyo, 2019) dan (Yusutria, 2019). Pengembangan keprofesional guru PAUD belum direncanakan dengan baik (Ita, 2020). Padahal guru PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidikan (dan mendapatkan tunjangan profesi) kinerjanya lebih baik dibanding yang belum memilikinya (Nusa & Irawan, 2020).

Guru belum memenuhi kompetensi profesional salah satunya ditunjukkan dengan tidak memiliki keterampilan dalam memberikan rangsangan pada setiap aspek perkembangan. Guru yang belum memenuhi kompetensi pedagogik ditunjukkan dalam proses pembelajaran tidak merencanakan dan menyusun rencana pembelajaran serta tidak menggunakan metode dan media pembelajaran melalui bermain sesuai dengan karakteristik anak (Afdhaliah & Amri, 2018).

Masalah SDM di PAUD bukan hanya terjadi pada guru, tapi juga pada Pengawas PAUD sehingga pengendalian mutunya belum berjalan dengan baik. Masalah pada Pengawas PAUD dapat dilihat dari jumlah dan kualifikasinya (Yunita-Murdiyaningrum, 2019). Penelitian itu juga menunjukkan bahwa rekrutmen pengawas PAUD juga belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu tidak mengherankan sebagian guru PAUD tidak puas dengan kinerja pengawasnya (Widyanto, 2014). Penelitian lain membuktikan bahwa supervisi pengawas PAUD berpengaruh positif dalam pelaksanaan pembelajaran para guru (Larasati, Wiyono, & Supriyanto, 2020).

Bagaimanakah kebijakan dalam pengarusutamaan PAUD?

Perubahan dari SDGs menjadi MDGs memunculkan target baru terkait pentingnya akses PAUD yang layak dan berkualitas (Wikan, 2019). Pada dekade terakhir pengembangan pendidikan dan perawatan anak usia dini telah menjadi prioritas bagi pemerintah dan badan internasional. Hal tersebut secara eksplisit dimasukkan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4.2). Pada tahun 2018 Kelompok Dua Puluh (G20) mengakui peran kunci PAUD dalam Deklarasi Pemimpin G20 (Urban *et al.*, 2019). Target tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 4.2 untuk “memastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar” (Milovantseva, Earle, & Heymann, 2018)

Pada dekade sebelumnya, PAUD kurang mendapat perhatian serius di banyak negara berkembang. Data menunjukkan bahwa hanya 15% negara berpenghasilan rendah menyediakan pendidikan PAUD tanpa biaya. Kurang dari 27% negara menawarkan pendidikan PAUD gratis selama dua tahun atau lebih. Ini sangat kontras dengan pendidikan dasar yang diberikan gratis oleh 96% negara (Milovantseva; Earle; Heymann, 2018). Ketimpangan ini juga terjadi di Indonesia, bahkan ketimpangan terjadi secara signifikan antara pendidikan dasar dibanding PAUD (Wikan, 2019). Di Nigeria juga diakui PAUD memainkan peran penting dalam tingkat pencapaian pembangunan berkelanjutan tetapi tidak dilaksanakan dengan baik (Chidinma & Rebecca, 2021).

Pada dekade terakhir ini Pemerintah dan Pemerintah Daerah telah membuat berbagai kebijakan untuk mengangkat dan memecahkan isu-isu PAUD. Berdasarkan penelusuran dokumen kebijakan pendidikan dalam 10 tahun terakhir, isu PAUD sudah banyak dibahas. Pada UU No. 23 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Indonesia, 2003) setidaknya telah ditemukan 16 frasa yang membahas PAUD, seperti tampak pada **gambar 2**.



Gambar 2. Pembahasan PAUD di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

Di 6 dokumen kebijakan Pemerintah terkait pendidikan yaitu di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014, RPJMN tahun 2015-2019, RPJMN tahun 2020-2020, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2010-2014, Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2015-2019, dan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahun 2020-2024 juga telah membahas isu PAUD dengan ditemukannya sekitar 500 kata. Sementara itu dari 4 dokumen kebijakan pendidikan Pemerintah Daerah dalam bentuk Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota ditemukan 350 kata “PAUD”. Temuan tersebut berdasarkan olahan dokumen menggunakan program Nvivo 12 Plus dengan kata pencarian “PAUD” seperti tampak pada **tabel 5**. Sementara frasa lengkapnya yaitu “Pendidikan Anak Usia Dini” juga banyak ditemukan.

Salah satu sasaran global tujuan pembangunan berkelanjutan terkait PAUD yang tertulis pada lampiran Keputusan Presiden Nomor 111 tahun 2022 adalah “Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar” (Mensesneg, 2022). Sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan terkait PAUD tahun 2023 adalah “meningkatkan persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini menjadi 72,77%”. Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Nasional tahun 2020,

kesiapan anak PAUD mengikuti pendidikan baru mencapai 62,48%. Indikator ini dapat dipenuhi dari Angka Kesiapan Sekolah (AKS) PAUD (Mensesneg, 2022).

Tabel 5. Kata PAUD dalam Dokumen Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah

Dokumen Kebijakan Nasional	Kata PAUD	Kata PAUD	Dokumen Kebijakan Daerah
1. Renstra Kemendikbud 2010-2014	55	57	Resntra Disdik Kabupaten Banyumas 2018-2023
2. Renstra Kemendikbud 2015-2019	175	135	Resntra Disdik Kota Semarang 2021-2026
3. Renstra Kemendikbud 2020-2024	122	38	Renstra Disdikbud Kabupaten Cilacap 2017-2022
4. RPJMN 2010-2014	72	126	Renstra Disdikbud Kabupaten Kendal 2021-2026
5. RPJMN 2015-2019	70	-	-
6. RPJMN 2020-2024	3	-	-

Sumber: Hasil pengolahan dokumen kebijakan pendidikan

Pengarusutamaan PAUD juga muncul pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal disebutkan pada pasal 2 ayat (1) bahwa "Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal." Pada pasal 2 ayat 2 tertulis bahwa salah satu jenis pelayanan dasar untuk Pemerintah Daerah kabupaten/kota adalah PAUD (Mendagri, 2021). Target dan Indikator Kinerja Pencapaian SPM Bidang Pendidikan jenis pelayanan dasar PAUD yaitu "Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD" dengan target 100%. Indikator ini dapat dipenuhi dari pencapaian APK atau APM PAUD (Mendagri, 2021).

Dokumen kebijakan lain yang menunjukkan pengarusutamaan PAUD ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2022 tentang Prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Salah satu arah kebijakan pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas SDM kesehatan dan pendidikan. Arah kebijakan pembangunan urusan pendidikan untuk memenuhi SPM pendidikan terkait PAUD adalah: (a) jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD dengan target 100%, (b) jumlah satuan PAUD yang mendapatkan akreditasi B dengan target 63,64%, (c) tingkat pertumbuhan pendidik PAUD S1 dan D4 target 69%, dan (d) rasio pengawas PAUD ditarget 3,2 (Mendagri, 2022).

Dalam penelitian ini telah ditemukan 14 dokumen kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pengarusutamaan PAUD. Temuan ini lebih banyak dari temuan sebelumnya bahwa di Indonesia sudah ada 8 intervensi kebijakan yang diperlukan untuk memperkuat PAUD. Langkah-langkah kebijakan di atas dijabarkan dalam peta jalan nasional pengembangan PAUD di Indonesia tahun 2020-2030 (Iskandar, 2020).

Namun demikian dukungan kebijakan PAUD tersebut belum sejalan dengan dukungan anggaran yang baru mencapai 1% (Iskandar, 2020). Temuan dalam dokumen anggaran tahun 2022 di empat daerah yang diteliti yang telah dikonfirmasi oleh para pejabat struktural membenarkan bahwa anggaran PAUD masih rendah. Di Kabupaten Banyumas Anggaran PAUD hanya 2% dari total anggaran pendidikan, Kabupaten Kendal sebesar 4%, Kota Semarang 1%, dan Kabupaten Cilacap 2%.

Selain masalah anggaran, implementasi kebijakan PAUD juga masih terkendala buruknya koordinasi antar instansi (Sudagung *et al.*, 2019). Dalam lima tahun terakhir ini, layanan PAUD telah mendapatkan perhatian yang besar baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Namun demikian kuantitas dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini di Indonesia masih sangat terbatas (Waspodo, 2012).

Simpulan

Angka partisipasi dan kualitas layanan PAUD di Provinsi Jawa Tengah tergolong menengah. Upaya-upaya yang direkomendasikan untuk meningkatkan angka partisipasi PAUD adalah dengan meningkatkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, perlu inovasi dalam penyelenggaraan PAUD seperti POS PAUD berbasis masyarakat, dan perhatian khusus perlu diberikan di daerah pedesaan atau daerah pinggiran. Selain itu direkomendasikan agar Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama di tingkat daerah menyusun program dan kegiatan untuk meningkatkan kualitas layanan PAUD seperti penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis bagi guru dan kepala PAUD. Telah ditemukan 18 dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengarusutamakan PAUD. Namun demikian hasilnya belum menggembirakan baik secara kuantitas dan kualitas. Untuk mengawal berbagai implementasi kebijakan PAUD tersebut direkomendasikan perlu ada kesungguhan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan dukungan anggaran yang memadai.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cilacap, Dinas Pendidikan Kota Semarang, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

Daftar Pustaka

- Afdhaliah, P.; Amri, A. (2018). Pengaruh Kompetensi Guru PAUD Terhadap Kualitas Pembelajaran di Kecamatan Nisam Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini*, 3, n. 4, <https://jim.usk.ac.id/paud/article/view/10526>
- Amedi, A. M. (2018). Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). *Padjadjaran Law Review*, 6, <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/389>.
- Astuti, Y. D. (2004). Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia: Permasalahan Kurikulum Taman Kanak Kanak. *Psikologika: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Psikologi*, 9, n. 18, p. 24-33, <https://doi.org/10.20885/psikologika.vol9.iss18.art3>.
- Bandur, A. (2019). *Penelitian Kualitatif: Studi Disiplin Keilmuan Dengan Nivo 12 Plus*. Bogor: Mitra Wacana Medika.
- Chidinma, A. E.; Rebecca, K. Y. (2021). Early Childhood Education And Sustainable Development Goals In Nigeria. *International Journal of Social and Humanities Extension (IJSHE)*, p. 1-5, <http://www.ijshe.info/index.php/ijshe/article/view/11>.
- Choiro, U. D. W.; Prasetyo, A. F. (2019). Peran Lembaga Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini. *PREMIERE: Journal of Islamic Elementary Education*, 1, n. 2, p. 35-42, <https://doi.org/10.51675/jp.v1i2.78>.
- Cholimah, N. (2013). Upaya Peningkatan Partisipasi Orang Tua dan Kualitas Pendidik pada Pendidikan Anak Usia Dini di Indonesia. *Cakrawala Dini: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3, n. 1, <https://doi.org/10.17509/cd.v3i1.10324>.
- Darajah, R.; Wijayanti, U. T. (2023). Partisipasi Orang Tua Milenial dalam Aspek Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7, n. 1, p. 1162-1172, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3411>.
- Fakhrudin, A. U. (2019). *Menjadi Guru PAUD*. Elex media komputindo, ISBN 6230003899.
- Hayon, P. L. (2019). Identifikasi Kebutuhan Guru Taman Kanak-Kanak (Tk) Di Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang. *Hanata Widya*, 8, n. 4, p. 9-18, <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fipmp/article/view/16324>.
- Holiza, W.; Yaswinda, Y. (2022). Evaluasi Kebijakan Paud Permendikbud Nomor 30. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2, n. 8, p. 2547-2556, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i8.1129>.

- Indonesia, P. R. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Iskandar, H. (2020). Realizing Quality Early Childhood Education and Parenting in Indonesia: Pitfalls and Strategies. *Atlantis Press*, 1-9, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200808.001>.
- Ita, E. (2020). Pengembangan profesionalitas guru pendidikan anak usia dini (studi pada taman kanak-kanak Ade Irma Mataloko Kabupaten Ngada). *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 7, n. 1, p. 62-74, <https://doi.org/10.38048/jipcb.v7i1.66>.
- Kartakusumah, Y. (2018). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak. *Tesis*, Universitas Pendidikan Indonesia, <http://repository.upi.edu/37405>.
- Larasati, A. D.; Wiyono, B. B.; Supriyanto, A. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Supervisi Pengawas Sekolah Terhadap Disiplin Kerja Guru Dalam Pembelajaran Di Paud. *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3, n. 3, p. 239-248, <http://dx.doi.org/10.17977/um027v3i32020p239>.
- Mendagri. (2021). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mendagri. (2022). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mendikbudristek. (2022). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 32 tahun 2022*. Jakarta, <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/upload/filemanager/download/2022/01%20Permendikbudristek%20No.%2032%20Tahun%202022%20ttg%20Standar%20Teknis%20Pelayanan%20Minimal%20Pendidikan.pdf>.
- Mensesneg. (2022). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Kementerian Sekretaris Negara.
- Milovantseva, N.; Earle, A.; Heymann, J. (2018). Monitoring progress toward meeting the United Nation SDG on pre-primary education: an important step towards more equitable and sustainable economies. *Int. Organ. Res. J*, 14, p. 122-143, <https://iorj.hse.ru/data/2019/02/07/1204070169/N.%20Milovantseva,%20A.%20Earle,%20J.%20Heymann.pdf>.
- Mushlih, A.; Rahimah, S. P.; Ma'fiyatun Insiyah, S. P.; Muzdalifah, S. P. *et al.* (2018). *Analisis Kebijakan PAUD: Mengungkap isu-isu menarik seputar AUD*. Penerbit Mangku Bumi, ISBN 6026155597.
- Nazidah, M. D. P. (2021). Problematika Linieritas dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru dalam Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6, n. 3, p. 2043-2051, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i3.1373>.
- Nengsi, A. W. (2019). Analisis problematika anak usia 3-5 tahun belum mendapatkan pendidikan di PAUD. *Al Fitrah: Journal of Early Childhood Islamic Education*, 2, n. 2, p. 300-308, <http://dx.doi.org/10.29300/alfitrah.v2i2.2273>.
- Nurhamidah, N.; Nurhafizah, N. (2019). Profesionalisme Guru PAUD di Era Digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3, n. 1, p. 666-675, <https://doi.org/10.31004/jptam.v3i2.264>.
- Nusa, P. R.; Irawan, E. (2020). Dampak Sertifikasi Dan Pendidikan Terakhir Terhadap Kinerja Guru Paud Di Kabupaten Ponorogo. *WISDOM: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 1, n. 1, p. 27-40, <https://doi.org/10.21154/wisdom.v1i1.2134>.
- Puspitasari, E. (2015). Pengembangan Model Pos PAUD Keliling. *Jurnal Educhild: Pendidikan dan Sosial*, 4, n. 2, p. 91-96, <http://dx.doi.org/10.33578/jpsbe.v4i2.3381>.

- Rohmani, N. (2020). Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Seluruh Indonesia. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5, n. 1, p. 625, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.262>.
- Rulandari, N. (2021). Study of Sustainable Development Goals (SDGs) Quality Education in Indonesia in the First Three Years. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4, n. 2, p. 2702-2708, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i2.1978>.
- Sachs, J.; Lafortune, G.; Kroll, C.; Fuller, G. et al. (2022). From crisis to sustainable development: The SDGs as roadmap to 2030 and beyond. *Sustainable Development Report*, <https://doi.org/10.1017/9781009210058>.
- Safitri, A. O.; Yuniarti, V. D.; Rostika, D. (2022). Upaya peningkatan pendidikan berkualitas di Indonesia: Analisis pencapaian sustainable development goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6, n. 4, p. 7096-7106, <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3296>.
- Schiariti, V.; Simeonsson, R. J.; Hall, K. (2021). Promoting developmental potential in early childhood: a global framework for health and education. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18, n. 4, p. 2007, <https://doi.org/10.3390/ijerph18042007>.
- Septiani, R.; Widyaningsih, S.; Iqomh, M. K. B. (2019). Tingkat perkembangan anak pra sekolah usia 3-5 tahun yang mengikuti dan tidak mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Jurnal Keperawatan Jiwa (JKJ): Persatuan Perawat Nasional Indonesia*, 4, n. 2, p. 114-125, <https://doi.org/10.26714/jkj.4.2.2016.114-125>.
- Sudagung, A. D.; Putri, V.; Evan, J.; Sasiva, I. et al. (2019). Upaya Indonesia Mencapai Target Sustainable Development Goals Bidang Pendidikan di Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau Kalimantan Barat (2014-2019). *Jurnal Polinter: Kajian Politik Dan Hubungan Internasional*, 5, n. 1, p. 1-27, <https://doi.org/10.52447/polinter.v5i1.2389>.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kebijakan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi)*. Bandung: Penerbit Alfabeta, ISBN 978-602-289-311-0.
- Suharyat, Y.; Nurhayati, S.; Januliawati, D.; Haryono, P. et al. (2023). Tantangan Pemberdayaan Orang Tua dalam Meningkatkan Mutu Layanan PAUD Era Digital. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7, n. 1, p. 406-415, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i1.3827>.
- Suryani, L.(2007). Analisis permasalahan pendidikan anak usia dini dalam masyarakat indonesia. *Jurnal Ilmiah Visi*, 2, n. 1, p. 42-48, <https://doi.org/10.21009/JIV.0201.6>.
- Tanaka, S.; Taguchi, S.; Yoshida, K.; Cardini, A. et al. (2019). Transforming Education towards Equitable Quality Education to Achieve the SDGs. *In The Digital Age*, <https://drive.google.com/file/d/1OciT3VMYZsYKicmMWDFMsAYD-7thoESD/view?usp=sharing>.
- Topothai, T.; Suphanchaimat, R.; Topothai, C.; Tangcharoensathien, V. et al. (2022). Thailand Achievement of SDG Indicator 4.2. 1 on Early Child Development: An Analysis of the 2019 Multiple Indicator Cluster Survey. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19, n. 13, p. 7599, <https://doi.org/10.3390/ijerph19137599>.
- Ulfah, M. (2019). Pendekatan Holistik Integratif Berbasis Penguatan Keluarga pada Pendidikan Anak Usia Dini Full Day. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4, n. 1, p. 10-19, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.255>.
- Urban, M.; Cardini, A.; Guevara, J.; Okengo, L. et al. (2019). *Early childhood development education and care: The future is what we build today*. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/503706/adbi-realizing-education-all-digital-age.pdf>.
- Waspodo, M. (2012). Pengembangan Profesional Berkelanjutan bagi Guru PAUD. *Jurnal Ilmiah Visi*, 7, n. 1, p. 77-81, <https://doi.org/10.21009/JIV.0701.7>.

- Widyanto, H. (2014). Tanggapan Guru Paud Terhadap Kinerja Pengawas Paud Dalam Mengembangkan Kompetensi Profesional Guru Paud Di Desa Mulioarjo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. 2014. *Tesis*: Unimed, <http://digilib.unimed.ac.id/7979>.
- Wikan, M. (2019). Implementasi Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam Mencapai Target Sustainable Development Goals di Kota Yogyakarta (Studi Kasus pada TK Negeri 2 Yogyakarta dan TK Rumah Citta Yogyakarta). *Skripsi*, Universitas Gadjah Mada, http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/177644.
- Woodhead, M. (2016). *Early childhood development in the SDGs*. <https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:79b5945c-9ae0-4e4b-a446-8781053f2fed>.
- Yunita-Murdiyaningrum, R.-R. (2019). Strategi Pengendalian Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). *Jurnal Penelitian Kebijakan Pendidikan*, 12, n. 2, p. 207-224, <https://doi.org/10.24832/jpkp.v12i2.292>.
- Yusutria, Y. (2019). Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini melalui Peningkatan Profesionalitas Guru. *Golden Age: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3, n. 1, <https://doi.org/10.29313/ga.v3i1.4828>.
- Zulyanto, A. (2022). Pendidikan Dan Pengentasan Kemiskinan Dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4, n. 1, p. 32-40, <https://doi.org/10.33369/convergencejep.v4i1.23385>.